



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2023-2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2025**


HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rencana Tindak lanjut
Universitas Qomaruddin
Tahun Akademik 2023-2024

Gresik, 7 Juli 2025

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Qomaruddin,




Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2023-2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Qomaruddin atas dukungan dan arahnya.
2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit atas partisipasi aktif.
3. Para Auditor AMI dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Unit.
4. Seluruh Ketua Program Studi yang telah menyusun RTL secara sistematis dan bertanggung jawab.

Semoga laporan ini menjadi acuan penting dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Qomaruddin

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Pelaksanaan	5
1.3 Rencana Tindak Lanjut	6
1.4 Hasil Pelaporan	6
BAB II Rencana Tindak Lanjut	7
BAB III Penutup	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan bagian integral dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menjamin perbaikan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), RTL menjadi tindak lanjut konkret dari hasil Audit Mutu Internal (AMI), serta menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.

Proses Audit Mutu Internal bukan sekadar bentuk evaluasi formal, melainkan sarana untuk mencermati kesesuaian antara pelaksanaan program dengan standar mutu yang ditetapkan. Hasil dari proses ini kemudian dipresentasikan dalam Rapat Pleno AMI sebagai forum koordinatif untuk menyelaraskan pandangan antarunit dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan.

RTL disusun oleh program studi dan unit kerja terkait sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan AMI. Dengan demikian, RTL tidak hanya mencerminkan respons terhadap evaluasi internal, tetapi juga menjadi alat pemacu peningkatan mutu akademik dan nonakademik secara sistematis dan berkelanjutan.

Keberadaan RTL sangat penting untuk mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perencanaan program tahunan seperti RKAKL, serta menjadi instrumen akuntabilitas mutu pada semua jenjang manajemen perguruan tinggi.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Penyusunan dan pelaksanaan RTL berlandaskan pada berbagai peraturan dan kebijakan nasional maupun institusional yang mengatur tentang pendidikan tinggi dan sistem penjaminan mutu, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, beserta perubahannya.

4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut disusun berdasarkan hasil identifikasi temuan dalam proses AMI dan hasil rekomendasi yang dibahas dalam Pleno AMI. Setiap Program Studi bertanggung jawab untuk menyusun rencana perbaikan yang konkret, terukur, dan realistis terhadap setiap temuan.

Ketua Program Studi atau Kepala Unit kerja menjadi penanggung jawab utama atas pelaksanaan RTL di tingkat masing-masing. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau Unit Penjaminan Mutu bertugas melakukan koordinasi, memfasilitasi proses penyusunan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RTL.

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan waktu, capaian, dan output yang telah disepakati. Selain itu, hasil pelaksanaan RTL juga menjadi bagian dari umpan balik untuk perbaikan dokumen SPMI dan perencanaan strategis institusi di masa mendatang.

1.4 Hasil Pelaporan

Berdasarkan hasil evaluasi dalam RTM, diperoleh berbagai temuan yang memerlukan tindak lanjut dari program studi dan unit kerja. Temuan-temuan tersebut meliputi aspek kelembagaan, akademik, sumber daya, serta tata kelola yang masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi yang disampaikan dalam RTM disusun berdasarkan pemetaan standar dalam dokumen SPMI dan mencakup berbagai upaya perbaikan, seperti peningkatan publikasi ilmiah, penguatan kolaborasi penelitian, pemutakhiran kurikulum, hingga penataan dokumen administratif.

Melalui laporan RTL ini, institusi memiliki peta jalan yang lebih terstruktur untuk memperbaiki mutu layanan akademik dan nonakademik. RTL juga menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran dan kegiatan strategis, sehingga seluruh elemen di lingkungan perguruan tinggi dapat bergerak seiring dalam satu arah peningkatan mutu yang berkelanjutan.

BAB II RENCANA TINDAK LANJUT

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	BAP Mata kuliah semester ganji dan genap 2023-2024 hanya berupa Jurnal Kuliah.	Tidak memahami BAP dalam pelaporan perkuliahan Semester.	Program studi tidak memiliki dokumen sah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti pelaksanaan perkuliahan .	Jurnal perkuliahan dilengkapi dengan dokumen SK mengajar, Daftar hadir mahasiswa dan Jadwal mengajar Dosen.	15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Audit.
			Program Studi Teknik Industri	0	0	0	0	0
			Program Studi Teknik Informatika	Prodi Teknik Informatika telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran dan mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian pembelajaran Universitas , tidak terpublikasi di website karena serangan cyber	0	0	0	0
			Program Studi Teknik Mesin	0	0	0	0	0
			Program Studi Teknik Elektro	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				Rumusan Level KKNI sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]				
			Program Studi Pendidikan Matematika					
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	0	0	0	0	0
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	0	0	0	0	
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Terdapat Dokumen Kurikulum yang lengkap dengan memuat Rumusan Capaian Pembelajaran dan mengacu pada SNIKTI serta level KKNI serta sudah diupload pada Website Prodi Manajemen Pendidikan Islam	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Program Studi Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0
			Program Studi Perbankan Syariah	0	0	0	0	0
			Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)	Rumusan Capain Pembelajaran yang tercantum dalam Dokumen meliputi rumusan level KKNI, SN-Dikti dan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). [OB]	0	0	0	0
		Apakah tersedia laporan Mahasiswa mengikuti tes standar (QET-TOEFL/TBA-TOAFL) dengan format yang setara dengan TOEFL/TOAFL internasional?	UPT Bahasa	0	0	0	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam					
			Program Studi Teknik Industri	0	0	0	0	0
			Program Studi Teknik Informatika	Prodi memiliki Matriks Kurikulum pada dokumen kurikulum prodi Teknik Informatika	0	0	0	0
			Program Studi Teknik Mesin	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Program Studi Teknik Elektro	Prodi Teknik Elektro telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	0	0	0	0
			Program Studi Pendidikan Matematika					
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	0	0	0	0	0
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	0	0	0	0	0
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Dokumen Kurikulum Program Studi memiliki Matrik terpublikasi di Website Prodi.				
			Program Studi Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0
			Program Studi Perbankan Syariah	0	0	0	0	0
			Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)	Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) milik Matrik Kurikulum yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum	0	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam					
			Program Studi Teknik Industri	Prodi Teknik Industri memiliki sejumlah	Belum adanya monitoring dan	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran	Program Studi Teknik Industri	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				65 MK, sedangkan RPS berjumlah 60 MK (92,3%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar. RPS yang belum ada adalah MKWK (Agama Islam, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia)	dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.
			Program Studi Teknik Informatika	Prodi Teknik Informatika hanya memiliki 80% RPS, mata kuliah yang tidak memiliki RPS diantaranya adalah: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Islam Sains, Bahasa Inggris, Dasar-dasar Pemrograman, Islam Multikultural, Kewirausahaan, Teori Informasi, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Pemrosesan Data Terdistribusi, Cloud Computing, Cyber Security, Metodologi Penelitian, Mesin Pembelajaran.	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Program Studi Teknik Mesin	Prodi Teknik Mesin memiliki sejumlah 65 MK, sedangkan RPS berjumlah 41 MK (62%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian.	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	Program Studi Teknik Mesin menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.
			Program Studi Teknik Elektro	Prodi Teknik Elektro memiliki sejumlah 68 MK, sedangkan RPS berjumlah 49 MK (72%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	Program Studi Teknik Elektro menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.
			Program Studi Pendidikan Matematika					
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	mata kuliah khusus prodi yang memiliki rps hanya sebesar 60%, untuk mata kuliah umum universitas tidak ada rps sama sekali	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	Program Studi PBI menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	RPS yang diupload sejumlah 48 dari 61 mata kuliah (78%)	belum adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Program Studi	ketiadaan monitoring dan evaluasi serta minimnya sosialisasi mengenai format RPS dapat menyebabkan berkurangnya mutu	Program Studi PAI perlu secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
					terhadap kelengkapan dokumen RPS dan kurangnya sosialisasi terhadap dosen terkait format RPS yang digunakan di program studi PAI	pendidikan serta tidak seragamnya kualitas dan kelengkapan dokumen RPS yang disusun oleh dosen. hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara RPS dan standar mutu akademik yang ditetapkan program studi, serta dapat mengganggu proses pembelajaran yang sistematis dan terukur	berkala terhadap dokumen RPS yang disusun oleh dosen. selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai format dan standar RPS yang berlaku agar semua dosen memiliki pemahaman dan acuan yang sama	Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Terdapat 90% RPS yang terkumpul dan diupload link RPSnya di Website Prodi Manajemen Pendidikan Islam				
			Program Studi Ekonomi Syariah	Prodi Ekonomi Syariah memiliki sejumlah 60 MK, (RPS berjumlah 54 dan 6 tidak ada MK (90%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	Program Studi Ekonomi Syariah menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.
			Program Studi Perbankan Syariah	Prodi Perbankan Syariah memiliki sejumlah 59 MK, sedangkan RPS berjumlah 56 MK (95%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK,	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	Program Studi Teknik Industri menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian.	format RPS yang sesuai standar.			
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	Prodi HKI memiliki 63 MK (termasuk Mk skripsi dan KKN), untuk RPS semester Ganjil sejumlah 31 RPS dan RPS Genap sejumlah 27. Total = 58 - 63 = - 5. [KTS]	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan format RPS.	berdampak terhadap mutu pembelajaran pada program studi hukum keluarga islam	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap format RPS secara menyeluruh.	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan perbaikan Format RPS secara menyeluruh.
	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Program Studi Teknik Industri	Prodi Teknik Industri tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]	Sudah dilakukan sosialisasi, namun minat mahasiswa rendah untuk melaksanakan MBKM. Belum adanya reward dari institusi bagi mahasiswa yang ikut MBKM.	Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di luar kampus dan mengurangi pencapaian indikator kinerja institusi terkait MBKM. Potensi ancaman penurunan Akreditasi LAM Teknik (Minimal 25% mahasiswa aat TS berkegiatan MBKM).	Program Studi Teknik Industri segera menyusun strategi dan rencana implementasi MBKM, termasuk bentuk kegiatan, mitra kerja sama, serta skema pelaksanaannya untuk tahun akademik berikutnya.	Perlu ada perencanaan Pedoman Teknik dan sosialisasi pemahaman di UQ (Universitas, Fakultas, Prodi) tentang Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
			Program Studi Teknik Informatika	Program Studi Teknik Informatika telah menyelenggarakan kegiatan MBKM terlihat di dokumen kurikulum dan juga bukti yang dilampirkan	0	0	0	0
			Program Studi Teknik Mesin	prodi sudah melakukan program mbkm yaitu wira usaha merdeka pada tahun 2023 saja	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal program studi terkait implementasi	Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di luar kampus dan mengurangi pencapaian	Program Studi Teknik Industri segera menyusun strategi dan rencana implementasi	Membentuk tim pelaksana MBKM di tingkat program studi, menyusun panduan pelaksanaan, serta mengidentifikasi mitra potensial untuk program

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
					program MBKM, serta keterbatasan kerja sama eksternal untuk mendukung pelaksanaan MBKM.	indikator kinerja institusi terkait MBKM.	MBKM, termasuk bentuk kegiatan, mitra kerja sama, serta skema pelaksanaannya untuk tahun akademik berikutnya.	magang, studi independen, dan bentuk MBKM lainnya.
			Program Studi Teknik Elektro	Prodi Teknik Elektro tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]	Sudah dilakukan sosialisasi, namun minat mahasiswa rendah untuk melaksanakan MBKM. Belum adanya reward dari institusi bagi mahasiswa yang ikut MBKM.	Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di luar kampus dan mengurangi pencapaian indikator kinerja institusi terkait MBKM. Potensi ancaman penurunan Akreditasi LAM Teknik (Minimal 25% mahasiswa aat TS berkegiatan MBKM).	Program Studi Teknik Elektro segera menyusun strategi dan rencana implementasi MBKM, termasuk bentuk kegiatan, mitra kerja sama, serta skema pelaksanaannya untuk tahun akademik berikutnya.	Perlu ada perencanaan Pedoman Teknis dan sosialisasi pemahaman di UQ (Universitas, Fakultas, Prodi) tentang Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
			Program Studi Pendidikan Matematika					
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	0	0	0	0	0
			Program Studi Pendidikan Agama Islam					
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Prodi telah mengikuti Program MBKM yang telah diselenggarakan oleh Kementerian				
			Program Studi Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Program Studi Perbankan Syariah	0	0	0	0	0
			Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)	Prodi HKI telah melaksanakan Program MBKM berupa program WMK pada semester Ganjil 2023-2024.	0	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran		Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam					
		Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Program Studi Teknik Industri	Prodi Teknik Industri memiliki 32 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.
			Program Studi Teknik Informatika	Prodi tidak memiliki 100% Berita Acara Perkuliahan, diantaranya: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Bahasa Inggris, Islam Multikultural, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Cloud Computing, Cyber Security, Pemrograman	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				berbasis Web, Interaksi Manusia Komputer, IoT, Matematika Diskrit, Analisa dan desain Algoritma, Mobile Computing, Technopreneurship, Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja, Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise				
			Program Studi Teknik Mesin	Prodi Teknik Mesin memiliki 15 dokumen Berita Acara perkuliahan.	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.
			Program Studi Teknik Elektro	Prodi Teknik Elektro memiliki hanya 33 dokumen Berita Acara perkuliahan dari 68 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.
			Program Studi Pendidikan Matematika					

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	hanya 54% berita acara perkuliahan yang diunggah oleh dosen karena mata kuliah universitas tidak mengunggah sama sekali	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	Program Studi PAI telah memiliki dokumen Berita Acara Perkuliahan <100% Mata Kuliah pada tiap semester namun isian BAP lengkap.	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.	Program Studi PAI perlu secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Berita Acara Perkuliahan	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Berita Acara Perkuliahan (BAP) kurang dari 100% dan tidak lengkap. Program studi sudah menyediakan Berita Acara Perkuliahan (BAP) pada tiap semester akan tetapi beberapa dosen tidak mengisi lengkap bahkan ada beberapa dosen yang tidak mengembalikan BAP. (KTS)	Keterbatasan Dosen yang sudah "sepuh" sehingga masih mengandalkan pengisian BAP manual. Efek dari hal ini adalah Kaprodi tidak dapat memeriksa BAP secara online karena belum terintegrasi dalam satu sistem.	Dosen tidak mengembalikan BAP yang telah disediakan oleh Prodi atau tidak mengisi BAP secara detail/lengkap.	Menggunakan BAP yang sudah online dan terintegrasi dengan sistem SIAKAD Universitas	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah
			Program Studi Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Program Studi Perbankan Syariah	0	0	0	0	0
			Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)	Prodi HKI memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Ganjil sebanyak 31 BAP, dan disemester Genap sebanyak 27 BAP. Total 58 BAP [KTS]	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan pelaksanaan perkuliahan berupa BAP (Berita Acara Perkuliahan)	berdampak terhadap mutu pembelajaran pada program studi hukum keluarga islam	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan pelaksanaan perkuliahan berupa BAP (Berita Acara Perkuliahan)	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan Berita Acara Perkuliahan setiap semester
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia dokumen rerata IPK lulusan seluruh program studi?	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;	Butuh Penyesuaian pedoman akademik dengan sistem akademik karena di UQ tidak sama dengan sistem yang sekarang, IPK mahasiswa sesuai dengan indikator. Namun butuh penyusunan dokumen akademik baru menyesuaikan sistem pelaporan di pddikti yang baru[KTS]	IPS di beberapa semester tidak bisa memenuhi Standar, karena Nilai Kerja Praktik dan Tugas Akhir tertunda pengisiannya.	IPS tidak memenuhi Standar	Pelaporan nilai hasil pembelajaran dilaporkan tepat waktu.	Sistem dan jadwal pelaporan penilaian pembelajaran sesuai dengan jadwal.
			Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi					
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dokumen Persentase dosen tetap $\geq 60\%$; $\geq 90\%$ dosen	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan,	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		berkualifikasi minimal S2; dosen memiliki rekam jejak dan sertifikasi pendidik; rasio dosen:mahasiswa sesuai SN-Dikti?	Keuangan dan SDM					
			Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah Sarana tersedia sesuai daftar kebutuhan kurikulum; laboratorium dan ruang kuliah aktif digunakan; ada laporan pemeliharaan dan aksesibilitas sarpras.?	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	0	0	0	0	0
			Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0
			UPT Laboratorium Pembelajaran Terpadu	Jadwal penggunaan ruang Lab, SOP Peminjaman, Penggunaan alat dan ruangan laboratorium ada di website. Terdapat informasi sistem inventaris dan sistem peminjaman pada aplikasi lokal. Sedangkan laporan pemeliharaan dan aksesibilitas Sarana	Tidak terdapat dokumen laporan pemeliharaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana dan juga tidak diupload di Website	Risiko mengakibatkan sebagian aktivitas terganggu	UPT melengkapi dokumen laporan pemeliharaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana, juga diupload di Website	UPT mengirim ke auditor terkait melengkapi dokumen laporan pemeliharaan dan aksesibilitas sarana prasana, serta juga diupload di Website

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				prasarana tidak ada di Website				
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran?	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	Tidak tersedia dokumen Renstra dan Renop	Belum dilaksanakannya Peraturan Yayasan No.064 Tahun 2022	Perencanaan pelaksanaan standar Dikti di UQ tidak terintegrasi dan terlaksana dengan baik	melakukan perencanaan sesuai dengan Peraturan Yayasan No.064 Tahun 2022	melakukan perencanaan sesuai dengan Peraturan Yayasan No.064 Tahun 2022
		Apakah tersedia standar satuan biaya operasional; laporan realisasi anggaran tahunan dibuat dan diaudit; proporsi pendanaan internal dan eksternal teridentifikasi?	Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0
		Apakah tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan?		0	0	0	0	

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		Apakah tersedia anggaran pengabdian masyarakata tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan?		0	0	0	0	0
		Apakah Tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;?	Fakultas Teknik	Dokumen Renop dan Renstra tersedia di Website, namun website tidak dapat diakses karena dihack pihak eksternal. Dokumen RKAT tidak terdapat informasi pembiayaan. OB	Website dihack pihak eksternal, informasi biaya tidak tercantum di RKAT	Membuat aktivitas pendidikan terhambat, namun tidak mengganggu aktivitas utama pendidikan	Fakultas melengkapi informasi biaya pada dokumen RKAT	Fakultas mengirim ke auditor terkait melengkapi informasi biaya pada dokumen RKAT
			Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	[Kebijakan] Belum ada dokumen kebijakan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. [KTS]	Belum ada panduan tertulis dari Universitas.	Prodi tidak memiliki Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas menyusun Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas melakukan penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan standar
				FKIP memiliki RKA 2023-2024 Tidak tersedia Standar Biaya UQ di dokumen RKA. [KTS]	Belum ada panduan tertulis dari Universitas.	Prodi tidak memiliki Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas menyusun Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas melakukan penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan standar
				Fakultas Tarbiyah	Dokumen Renop dan Renstra tersedia, namun dokumen RKAT tidak tersedia dan juga tidak tersedia di website. KTS	Dokumen tidak lengkap (tidak tersedia dokumen RKAT) dan dokumen juga tidak tersedia di website	Risiko mengakibatkan sebagian aktivitas terganggu	Fakultas melengkapi dokumen dan upload di website

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
			Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pengesahan RKT 2023-2024 oleh Tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan oleh Tim FEBI. Tidak tersedia Standar Biaya UQ di dokumen RKT	Belum ada panduan tertulis dari Universitas.	Prodi tidak memiliki Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas menyusun Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas melakukan penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan standar
				belum ada dokumen kebijakan pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum ada panduan tertulis dari Universitas.	Prodi tidak memiliki Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas menyusun Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas melakukan penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan standar
			Fakultas Syariah	Pengesahan RKT 2023-2024 oleh Tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan oleh Tim Syariah. Tidak tersedia Standar Biaya UQ di dokumen RKT	Belum ada panduan tertulis dari Universitas.	Prodi tidak memiliki Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas menyusun Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Standar	Fakultas melakukan penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan standar
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Tersedia standar satuan biaya operasional; laporan realisasi anggaran tahunan dibuat dan diaudit; proporsi pendanaan internal dan eksternal teridentifikasi.?	Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0
9	Standar Hasil Penelitian	Apakah Jumlah artikel ilmiah, HKI, paten, atau publikasi lain yang dihasilkan; proporsi hasil penelitian yang	LPPM	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		dipublikasikan secara terbuka.?						
10	Standar Isi Penelitian	Apakah Proposal atau laporan penelitian mencantumkan ruang lingkup materi dasar/terapan yang sesuai; dokumentasi luaran mengacu pada luaran wajib.?	LPPM	0	0	0	0	0
11	Standar Proses Penelitian	Apakah Terdapat dokumen rencana, logbook pelaksanaan, laporan akhir, serta evaluasi mutu dan keamanan kegiatan penelitian.?	LPPM	0	0	0	0	0
12	Standar Penilaian Penelitian	Apakah Tersedia instrumen penilaian dan rubrik; ada bukti proses penilaian oleh reviewer independen; hasil penilaian terdokumentasi.?	LPPM	0	0	0	0	0
13	Standar Peneliti	Apakah Persentase peneliti dengan kualifikasi akademik sesuai (minimal S2 untuk ketua); rekam jejak publikasi di SINTA/Google Scholar.?	LPPM	0	0	0	0	0
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Apakah Ketersediaan dan kecukupan laboratorium, perangkat lunak/keras penelitian, ruang	LPPM	Tidak ada laporan maupun dokumen ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan teknis terkait	Menyulitkan proses evaluasi diri dan audit mutu internal (AMI), karena standar tidak bisa dibuktikan ketercapaiannya serta	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian serta membangun sistem inventarisasi	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian, membentuk tim pendataan atau PIC dokumentasi sarpras penelitian yang

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		kerja dosen/peneliti; hasil analisis kebutuhan sarana tersedia dan tervalidasi.?		pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat	pendataan dan dokumentasi sarana-prasarana khusus untuk penelitian serta tidak ada koordinasi yang baik dengan biro sarpras.	menyulitkan penyusunan renstra LPPM.	terintegrasi antar unit.	berkoordinasi dengan biro sarpras
15	Standar Pengelolaan Penelitian	Apakah Tersedia dokumen rencana strategis penelitian; unit pengelola aktif menyusun panduan, memantau, mengevaluasi, dan mendiseminasikan hasil penelitian.?	LPPM	0	0	0	0	0
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Apakah Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan.?	LPPM	Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun, ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan, penelitian eksternal mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah	persaingan yang sangat ketat, lemahnya kualitas proposal, kurangnya rekam jejak dan dukungan institusi, serta belum optimalnya manajemen hibah di tingkat kampus.	mengakibatkan stagnasi akademik, rendahnya luaran penelitian, turunnya kualitas institusi, dan gagalnya kampus menjadi pusat inovasi dan perubahan sosial.	Mengadakan pelatihan penulisan proposal kompetitif, membentuk tim reviewer internal sebelum pengiriman, menguatkan akun SINTA dan portofolio luaran.	Mengintegrasikan keterampilan menulis proposal hibah ke dalam program pengembangan dosen baru, menyusun roadmap riset dan pengabdian tiap prodi untuk mendukung kesesuaian proposal hibah dengan prioritas nasional, Klinik proposal (bimbingan 1-on-1 untuk proposal hibah),
17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Jumlah kegiatan yang menghasilkan solusi untuk masyarakat, TTG, bahan ajar, dan pemanfaatan hasil	LPPM	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		oleh mitra/masyarakat.?						
18	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Materi program pengabdian mengacu pada hasil penelitian, pengembangan IPTEK, serta relevan dengan kebutuhan lokal/masyarakat sasaran.?	LPPM	0	0	0	0	0
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Setiap kegiatan memiliki dokumen rencana, logbook pelaksanaan, dan laporan hasil; ada sistem MONEV internal dan pelibatan masyarakat.?	LPPM	0	0	0	0	0
20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Tersedia instrumen dan rubrik penilaian; laporan evaluasi menunjukkan indikator dampak sosial, kepuasan mitra, serta keberlanjutan program.?	LPPM	0	0	0	0	0
21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Persentase dosen tetap pelaksana $\geq 75\%$; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi	LPPM	Persentase dosen tetap pelaksana < 75%; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi	karena akses terhadap pendanaan terbatas serta dianggap kurang prioritas dibanding pengajaran dan penelitian	melemahkan pengaruh sosial kampus, menghambat perkembangan akademik dosen, menurunkan mutu institusi, dan menjauhkan kampus dari masyarakat.	Meningkatkan sosialisasi makna dan strategi PkM berbasis keilmuan dosen, menambah jumlah hibah internal kampus, menyederhanakan	Sosialisasi pentingnya PkM dan integrasi dalam Tri Dharma serta pelatihan penyusunan proposal PkM dan pelaporan luaran

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		pengabdian dilakukan rutin.?		pengabdian belum pernah dilakukan			proses pelaporan PkM.	
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Daftar fasilitas yang digunakan (ruang, peralatan, kendaraan, dll.); ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan kegiatan dan standar keamanan.?	LPPM	tidak ada laporan maupun dokumen yang menunjukkan ketersediaan fasilitas kebutuhan kegiatan dan standar keamanan	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan teknis terkait pendataan dan dokumentasi sarana-prasarana khusus untuk penelitian serta tidak ada koordinasi yang baik dengan biro sarpras.	Menyulitkan proses evaluasi diri dan audit mutu internal (AMI), karena standar tidak bisa dibuktikan ketercapaiannya serta menyulitkan penyusunan renstra LPPM.	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian serta membangun sistem inventarisasi terintegrasi antar unit.	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian, membentuk tim pendataan atau PIC dokumentasi sarpras penelitian yang berkoordinasi dengan biro sarpras
23	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Lembaga pengelola memiliki dokumen rencana strategis, SOP, laporan kegiatan, dan bukti fasilitasi serta evaluasi program pengabdian.?	LPPM	0	0	0	0	0
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Tersedia anggaran tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan.?	LPPM	0	0	0	0	0
25	Standar Perpustakaan	Apakah Tersedia kebijakan tertulis pengembangan	UPT Perpustakaan	Berdasarkan hasil audit terhadap pengelolaan koleksi	Temuan ini menunjukkan perlunya	Kondisi ini berisiko menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya	Perpustakaan perlu meningkatkan digitalisasi layanan	Perpustakaan menyusun dan mengimplementasikan sistem otomasi berbasis

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		koleksi; jumlah koleksi sesuai rasio 1:5 terhadap jumlah pemustaka; tersedia repositori terbuka dan akses koleksi digital.?		perpustakaan, diketahui bahwa institusi telah memiliki kebijakan tertulis terkait pengembangan koleksi, namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi indikator. Pengelolaan koleksi masih menggunakan aplikasi Simple Perpust yang bersifat offline, tanpa dukungan repositori terbuka maupun sistem digital perpustakaan berbasis online. Selain itu, belum tersedia website resmi sebagai media akses koleksi digital, dan belum terdapat penambahan koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan literasi masing-masing program studi. Dokumen pendukung tersedia namun belum lengkap dan belum mendukung indikator secara optimal	peningkatan dalam hal digitalisasi layanan perpustakaan, pengembangan repositori, serta penyesuaian koleksi dengan kebutuhan akademik program studi guna mendukung Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan	informasi oleh sivitas akademika, meskipun belum mengganggu aktivitas utama pendidikan. Upaya peningkatan harus difokuskan pada penyediaan platform digital perpustakaan, pengembangan konten repositori institusional, serta evaluasi berkala terhadap relevansi koleksi.	melalui pengembangan aplikasi otomasi dan portal akses koleksi digital. Penguatan repositori institusional juga penting untuk mendukung keterbukaan akses karya ilmiah. Penyesuaian koleksi harus diselaraskan dengan kebutuhan akademik program studi. Selain itu, peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan literasi digital serta penyusunan roadmap pengembangan layanan berbasis TIK sangat diperlukan. Monitoring dan evaluasi berkala perlu diterapkan agar pengembangan layanan berjalan berkelanjutan dan optimal dalam mendukung pelaksanaan	digital serta mengembangkan repositori institusional pada tahun akademik berjalan. Penyesuaian koleksi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan literasi masing-masing program studi. Selain itu, akan dilaksanakan pelatihan pustakawan terkait literasi digital dan pengelolaan repositori. Roadmap pengembangan layanan perpustakaan juga akan disusun sebagai panduan jangka pendek dan menengah. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
							Tridharma Perguruan Tinggi	
		Apakah Rasio ruang perpustakaan minimal 0,5 m ² x jumlah pemustaka; tersedianya meja baca ≥10% pemustaka; tersedia akses Wi-Fi, CCTV, ruang diskusi, dan ruang penyandang disabilitas.?	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0
		Apakah Perpustakaan buka minimal 48 jam/minggu; tersedia layanan daring 24/7; ≥7 jenis layanan aktif; minimal 6 sesi literasi informasi/tahun; survei kepuasan dilakukan tiap tahun.?	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0
		Apakah Minimal 50% pustakawan bersertifikat; rasio pustakawan: teknis = 2:1; pengembangan profesional ≥3 kali/tahun; kepala perpustakaan minimal S2 dan aktif di asosiasi profesi.?	UPT Perpustakaan	Berdasarkan hasil audit terhadap standar tenaga perpustakaan, diketahui bahwa terdapat empat orang pustakawan, namun hanya dua di antaranya yang aktif mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional, dan satu pustakawan yang memiliki ijazah	akar penyebab belum terpenuhinya standar tenaga perpustakaan di perguruan tinggi ini antara lain adalah belum adanya kebijakan institusional yang secara khusus mengatur pengembangan karier pustakawan,	Akibat dari belum terpenuhinya standar tenaga perpustakaan, kualitas layanan informasi akademik menjadi kurang optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Minimnya pustakawan bersertifikat dan kurangnya kompetensi teknis maupun manajerial berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan koleksi dan layanan berbasis TIK.	Untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, perguruan tinggi perlu menetapkan kebijakan pengembangan SDM pustakawan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sertifikasi,	Perguruan tinggi menyusun kebijakan pengembangan SDM perpustakaan yang mencakup pelatihan rutin, program sertifikasi, dan pembinaan karier pustakawan. Dalam jangka pendek, dua pustakawan akan diikutkan dalam program pelatihan dan sertifikasi nasional. Kami juga akan melakukan evaluasi ulang rasio tenaga pustakawan dan teknis, serta

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				kepastakawanan telah mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan rasio pustakawan bersertifikat belum mencapai 50% seperti yang disyaratkan, dan belum ada bukti dokumentasi terkait keaktifan kepala perpustakaan di asosiasi profesi maupun pemenuhan rasio teknis sesuai standar (2:1).	termasuk kewajiban mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan keterlibatan dalam asosiasi profesi. Selain itu, perencanaan kebutuhan SDM pustakawan belum berbasis analisis rasio ideal dan kompetensi sesuai standar nasional. Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan profesional serta kurangnya sistem monitoring dan dokumentasi menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen kelembagaan untuk menjadikan penguatan tenaga perpustakaan sebagai bagian integral dari peningkatan mutu layanan akademik.	Ketiadaan dokumentasi serta keterlibatan kepala perpustakaan dalam asosiasi profesi juga berdampak pada rendahnya daya saing dan jejaring profesional institusi. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian standar nasional perpustakaan serta berdampak jangka panjang pada akreditasi institusi dan mutu dukungan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi.	pelatihan rutin, dan keterlibatan aktif dalam asosiasi profesi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rasio dan kualifikasi tenaga perpustakaan secara berkala serta penguatan dokumentasi kinerja dan keanggotaan profesi. Perguruan tinggi juga disarankan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan pustakawan dan menetapkan target peningkatan kompetensi teknis dan manajerial sesuai standar nasional. Langkah ini penting untuk memastikan layanan perpustakaan dapat mendukung secara optimal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.	menyusun struktur organisasi perpustakaan yang sesuai standar. Kepala perpustakaan akan didorong untuk aktif dalam asosiasi profesi, dan sistem dokumentasi keanggotaan serta aktivitas profesional akan diperbaiki sebagai bagian dari monitoring berkelanjutan.
		Apakah Tersedia SK pendirian, struktur organisasi, dan 3 kebijakan utama;	UPT Perpustakaan	Berdasarkan hasil audit terhadap standar penyelenggaraan	Akar penyebab kondisi ini adalah belum adanya perhatian dan	belum tersedianya dokumen legalitas dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan menyebabkan	perguruan tinggi segera menyusun dan menetapkan Surat Keputusan	Institusi perlu segera menyusun dan menerbitkan dokumen legal formal, mendaftarkan perpustakaan

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		perpustakaan terdaftar dan memiliki NPP dari Perpusnas; dokumen SOP tersedia dan diterapkan.?		perpustakaan, diketahui bahwa perpustakaan belum memiliki dokumen legalitas berupa Surat Keputusan (SK) pendirian maupun struktur organisasi yang jelas. Selain itu, belum tersedia dokumen kebijakan utama seperti kebijakan koleksi, pelayanan, dan pengolahan bahan perpustakaan secara tertulis dan terverifikasi, serta perpustakaan belum terdaftar di Perpustakaan Nasional dan belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). Dokumen standar operasional prosedur (SOP) juga belum ditemukan dan belum diterapkan secara formal. Dengan demikian, dokumen pendukung terhadap indikator tidak tersedia, Meskipun kondisi ini belum mengganggu aktivitas pendidikan secara langsung, namun berpotensi	kebijakan institusi secara khusus terhadap legalitas dan tata kelola perpustakaan, serta kurangnya koordinasi antara unit perpustakaan dan pimpinan dalam penyusunan dokumen formal seperti SK, struktur organisasi, kebijakan layanan, dan SOP yang sesuai standar nasional.	rendahnya legitimasi kelembagaan, terbatasnya akses terhadap program pembinaan nasional, serta potensi hambatan dalam proses akreditasi institusi. Hal ini juga dapat mengurangi efektivitas layanan dan sulitnya melakukan evaluasi serta pengembangan berbasis standar.	(SK) pendirian perpustakaan serta struktur organisasinya secara resmi. Selain itu, perlu disusun kebijakan tertulis terkait koleksi, layanan, dan pengolahan bahan pustaka. Perpustakaan juga perlu mendaftarkan diri ke Perpusnas untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan mulai menyusun serta menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar tata kelola. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat legalitas, meningkatkan mutu layanan, dan memenuhi standar nasional perpustakaan.	ke Perpusnas untuk memperoleh NPP, serta menyusun dan menerapkan SOP sesuai dengan standar yang berlaku.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				menimbulkan risiko administratif dan kelembagaan di masa mendatang.				
		Apakah Tersedia rencana strategis dan laporan tahunan; situs web perpustakaan aktif; sistem otomasi digunakan; kerja sama dibuktikan dengan MoU atau PKS.?	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0
		Apakah Tersedia laporan 3 inovasi dan 3 keunikan dalam 3 tahun terakhir; bukti prestasi kelembagaan atau pustakawan minimal 3 kali dalam 3 tahun.?	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0
		Apakah Tersedia program 3 kali/tahun; data statistik kunjungan meningkat; mitra sahabat perpustakaan atau duta baca terbentuk.?	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0
		Apakah Rasio pustakawan, koleksi, dan cakupan layanan dipenuhi; program pelibatan masyarakat ≥ 3 per tahun; ada laporan	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		tahunan capaian IPLM.?						
26	Standar Kerjasama		Wakil Rektor III Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik					
		Apakah Adanya dokumen perjanjian kerja sama yang menjelaskan kontribusi pada Tridharma; kegiatan kerja sama dilaporkan dan dinilai berdampak terhadap kualitas akademik dan kinerja lembaga.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0
		Apakah Perjanjian kerja sama memuat prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit; evaluasi kerja sama mempertimbangkan prinsip-prinsip ini.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0
		Apakah Jumlah kerja sama akademik aktif; adanya dokumen MoU/MoA terkait kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; keberhasilan program mobilitas atau kolaborasi.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		Apakah Jumlah kegiatan non-akademik aktif; kontribusi terhadap peningkatan sumber daya atau aset; keberlanjutan dan laporan pemanfaatan hasil kerja sama.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0
		Apakah Tersedia bentuk perjanjian dengan pola kerja sama yang sesuai; identifikasi peran masing-masing pihak secara jelas dalam dokumen kerja sama.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0
		Apakah Bukti akreditasi mitra luar negeri; kerja sama tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI); perjanjian dibuat dalam dua bahasa.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0
		Apakah Tersedianya template perjanjian kerja sama sesuai pasal 47; dokumentasi lengkap perjanjian dan implementasinya; dievaluasi secara berkala.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	Berdasarkan hasil audit, dokumen perjanjian kerja sama telah tersedia lengkap dan memenuhi ketentuan pasal 47, termasuk identitas pihak, ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta aspek hukum lainnya. Namun, sebagian besar	Akar penyebab dari belum terintegrasinya dokumentasi perjanjian kerja sama di tingkat institusi adalah belum adanya sistem pengelolaan data kerja sama yang terpusat serta kurangnya koordinasi antara	Akibat dari belum terintegrasinya dokumentasi kerja sama secara institusional adalah terhambatnya proses monitoring dan evaluasi kerja sama secara menyeluruh, serta berkurangnya efektivitas pelaporan dan pemanfaatan hasil kerja sama untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini juga dapat menimbulkan	Disarankan agar perguruan tinggi segera membangun sistem pengelolaan kerja sama terpadu di tingkat institusi, termasuk penetapan SOP yang mengatur penyimpanan, pelaporan, dan evaluasi perjanjian	Perguruan tinggi mengembangkan sistem pengelolaan kerja sama terpusat melalui penunjukan unit pengelola khusus dan penyusunan SOP terkait penyimpanan, pelaporan, dan evaluasi perjanjian kerja sama. Seluruh unit akan diminta mengumpulkan dokumen kerja sama untuk diintegrasikan, dan evaluasi berkala akan dilakukan guna

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				perjanjian masih tersimpan di tingkat program studi atau biro terkait, sehingga perlu integrasi dan sentralisasi dokumentasi di tingkat institusi untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan yang lebih strategis.	unit program studi, biro, dan pimpinan institusi. Selain itu, belum tersedia kebijakan atau SOP khusus yang mengatur penyimpanan, pelaporan, dan evaluasi perjanjian kerja sama secara institusional dan terdokumentasi dengan baik.	risiko ketidaksesuaian administratif dan lemahnya akuntabilitas lembaga.	kerja sama. Selain itu, perlu dilakukan integrasi data dari unit-unit terkait agar kerja sama dapat dimanfaatkan secara strategis dan akuntabel.	memastikan akuntabilitas dan pemanfaatan strategis.
		Apakah Tersedianya laporan periodik kerja sama ke PD Dikti; bukti evaluasi kegiatan; respons terhadap peringatan dan perbaikan berkas kerja sama jika diminta.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	0	0	0	0	0
27	Standar Ma'had Jami'ah	Apakah Adanya kurikulum terstruktur yang menggabungkan nilai-nilai pesantren dengan pembelajaran akademik.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah tidak memiliki dokumen kurikulum terstruktur yang menggabungkan nilai-nilai pesantren dengan pembelajaran akademik. Dokumen yang ada berupa RPS 4 Mata Kuliah, yaitu : 1. Fiqih Ibadah dan Muamalah (2 RPS dengan Kajian yang berbeda). 2. Islam	Tidak tersedia dokumen yang mendukung indikator.	Risiko membuat aktivitas pendidikan berhenti total.	Perbaikan menyeluruh kurikulum terstruktur yang menggabungkan nilai-nilai pesantren dengan pembelajaran akademik.	Semester Genap 2024-2025

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				Multikultur. 3. Islam Kontemporer. [KTS]				
		Apakah Minimal 80% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter di Ma'had Jami'ah.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan serta absensi kegiatan pondok ramadhan tahun 2025. 80% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter di Ma'had Jami'ah berupa kegiatan pondok ramadhan. Ma'had Jami'ah juga memiliki dokumen Asesmen awal dan Laporan pemetaan hasil uji kompetensi keagamaan mahasiswa baru Universitas Qomaruddin tahun2024.	0	0	0	0
		Apakah Tersedia fasilitas pendukung (asrama, mushola, perpustakaan kitab kuning) yang memadai.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah memiliki sebagian fasilitas pendukung (Masjid UQ dan perpustakaan kitab kuning). Dokumen berupa File kitab kuning, naskah digitas lembaga Nahdlatut Turats dan British Library.	0	0	0	0
		Apakah Adanya program mentoring oleh ustadz/ustadzah yang kompeten di	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah tidak memiliki dokumen program mentoring oleh	Tidak tersedia dokumen yang mendukung indikator.	Risiko membuat aktivitas pendidikan berhenti total.	Perbaikan menyeluruh program mentoring oleh	Semester Genap 2024-2025

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
		bidang keagamaan dan kewirausahaan.?		ustadz/ustadzah yang kompeten di bidang keagamaan dan kewirausahaan. Dokumen yang ada berupa dokumen Asesmen awal dan Laporan pemetaan hasil uji kompetensi keagamaan mahasiswa baru Universitas Qomaruddin tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan dan laporan serta absensi kegiatan pondok ramdahan tahun 2025. [KTS]			ustadz/ustadzah yang kompeten di bidang keagamaan dan kewirausahaan.	
		Apakah tersedia laporan evaluasi berkala terhadap perkembangan karakter mahasiswa melalui laporan semesteran.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah tidak memiliki laporan evaluasi berkala terhadap perkembangan karakter mahasiswa melalui laporan semesteran. [KTS]	Tidak tersedia dokumen yang mendukung indikator.	Risiko membuat aktivitas pendidikan berhenti total.	Perbaikan menyeluruh laporan evaluasi berkala terhadap perkembangan karakter mahasiswa melalui laporan semesteran.	Semester Genap 2024-2026
28	Standar Tata Nilai Keislaman	Apakah tersedia dokumen terkait Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran (misal: mata kuliah wajib keislaman)?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah memiliki Dokumen Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran (misal: mata kuliah wajib keislaman). Dokumen berupa RPS 4 Mata Kuliah, yaitu : 1. Fiqih	0	0	0	0

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				Ibadah dan Muamalah (2 RPS dengan Kajian yang berbeda). 2. Islam Multikultur. 3. Islam Kontemporer.				
		Apakah Minimal 90% sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) mematuhi aturan berpakaian dan etika Islami.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah tidak memiliki Dokumen Minimal 90% sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) mematuhi aturan berpakaian dan etika Islami. [KTS]	Tidak tersedia dokumen yang mendukung indikator.	Risiko membuat aktivitas pendidikan berhenti total.	Perbaikan Minimal 90% sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) mematuhi aturan berpakaian dan etika Islami.	Semester Genap 2024-2026
		Apakah Terselenggaranya kegiatan keagamaan rutin (kajian, shalat berjamaah, tahfiz) setiap pekan.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah memiliki Dokumen Terselenggaranya kegiatan keagamaan rutin (kajian, shalat berjamaah, tahfiz) setiap pekan. Dokumen yang ada Kajian Yakafi dan pondok ramadhan.	0	0	0	0
		Apakah Adanya panduan tata nilai keislaman yang tercantum dalam dokumen akademik.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah tidak memiliki panduan tata nilai keislaman yang tercantum dalam dokumen akademik. [KTS]	Tidak tersedia dokumen yang mendukung indikator.	Risiko membuat aktivitas pendidikan berhenti total.	Perbaikan menyeluruh panduan tata nilai keislaman yang tercantum dalam dokumen akademik.	Semester Genap 2024-2026
		Apakah Survei kepuasan mahasiswa terhadap penerapan nilai keislaman mencapai minimal 85%.?	Ma'had Jami'ah	Ma'had Jami'ah tidak memiliki dokumen Survei kepuasan mahasiswa terhadap penerapan nilai keislaman	Tidak tersedia dokumen yang mendukung indikator.	Risiko membuat aktivitas pendidikan berhenti total.	Perbaikan menyeluruh Survei kepuasan mahasiswa terhadap penerapan nilai keislaman	Semester Genap 2024-2026

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Analisis dan Catatan Auditor/ Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Rencana Perbaikan/ Tindak Lanjut
				mencapai minimal 85%. [KTS]			mencapai minimal 85%.	

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan komponen krusial dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merepresentasikan komitmen institusi terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) dan Pleno AMI, institusi telah melakukan refleksi menyeluruh atas kinerja program studi dan unit kerja, serta mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki maupun dikembangkan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil AMI, seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan Universitas Qomaruddin telah menyusun rencana perbaikan yang terarah dan terukur. Proses ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), yang menjadi landasan utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional.

RTL bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan menjadi pedoman aksi nyata bagi program studi dan unit kerja untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi secara sistemik. RTL juga berfungsi sebagai referensi utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) serta program pengembangan lainnya. Dengan demikian, keberadaan RTL mendorong integrasi antara evaluasi mutu dan perencanaan strategis institusi.

Penyusunan RTL ini merupakan bentuk akuntabilitas akademik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Kendali Mutu Fakultas, auditor internal, hingga ketua program studi. Partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi RTL dan pencapaian tujuan mutu institusi.

Kami mengharapkan agar seluruh unit di lingkungan Universitas Qomaruddin berkomitmen untuk melaksanakan RTL secara konsisten, dan menjadikannya sebagai pijakan utama dalam menyusun program kerja dan kegiatan akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, mutu pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan zaman dapat tercapai.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan dan pengesahan RTL ini. Semoga laporan ini

menjadi bagian dari upaya kolektif kita dalam membangun budaya mutu yang kokoh dan berkelanjutan.